

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat serta martabatnya tersebut anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Sebagai implementasi dan jaminan terhadap perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang

serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sebelumnya telah diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Oleh karena itu dengan tujuan mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa, maka pada tanggal 30 Juli 2012 Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada UU SPPA, terjadi perubahan paradigma dibandingkan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada peran, tugas dan tanggung jawab dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, sehingga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan dan wajib dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya sejak tanggal 30 Juli 2014. Namun, setelah lebih dari 3 (tiga) tahun ini Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Alumni. Hal. 30.

Anak diberlakukan ternyata perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan terutama oleh aparat penegak hukum.

Rika Saraswati dalam bukunya mengatakan meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan . . . bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih belum berperspektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan.<sup>2</sup>

Dalam praktik peradilan pidana anak seringkali ditemukan penegak hukum yang kurang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan kurang memahami masalah anak. Bahkan dalam menangani perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum sering tidak melaksanakan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengabaikan hak-hak Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana Anak, dengan kata lain aparat penegak hukum telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelanggaran yang sering terjadi dalam proses peradilan anak adalah penahanan terhadap Anak terutama pada tingkat penuntutan. Penahanan terhadap Anak dipaksakan oleh Penuntut Umum Anak walaupun sangat jelas tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>2</sup> Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Hal 27-28.

Selain itu Penuntut Umum Anak juga sering mengabaikan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak terutama asas keadilan dan asas penghindaran pembalasan, hal tersebut terlihat jelas dalam tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yaitu menerapkan Dakwaan Alternatif berdasarkan aturan pidana umum dengan ancaman hukuman yang lebih berat, padahal perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sangat jelas diatur pula dalam aturan pidana khusus yang ancamannya lebih ringan, sehingga tindakan Penuntut Umum Anak tersebut sangat merugikan Anak dan mengakibatkan anak dalam proses peradilan pidana tidak terpenuhi haknya yakni hak untuk memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang obyektif dan hak untuk memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom mengatakan dalam bukunya bahwa hak-hak Anak dalam proses penuntutan meliputi hak-hak sebagai berikut : menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan; membuat dakwaan yang dimengerti Anak; secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan; melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.<sup>3</sup>

Praktik penanganan perkara Anak yang akan dilakukan penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah penanganan perkara Anak dalam proses peradilan pidana Anak tingkat penuntutan yang ditangani oleh Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, yaitu kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh beberapa Anak pelaku tindak pidana yang menyebabkan Anak Korban menderita luka, perkara tindak pidana khusus Anak tersebut telah dilimpahkan, diperiksa serta diputus oleh Hakim

---

3 Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Penerbit Refika Aditama. Hal 142.

Pengadilan Negeri Kepanjen dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpn.

Uraian singkat mengenai permasalahan dalam perkara pidana khusus Anak tersebut adalah pada awalnya Anak pelaku tindak pidana sebanyak 6 Anak yang rata-rata berumur 15 dan 16 tahun sepakat untuk meminum minuman beralkohol dengan mengajak Anak Korban yang juga berusia 15 tahun di suatu tempat yang telah disepakati bersama. Setelah minuman habis, karena pengaruh alkohol emosi Anak pelaku tindak pidana tersebut tidak terkontrol sehingga salah satu Anak melakukan pemukulan terhadap temannya sendiri yakni Anak Korban. Bukannya melerai, justru teman-teman lainnya turut melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Anak Korban dan salah satu Anak juga ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban menggunakan benda berupa gear hingga mengakibatkan luka pada Anak Korban yaitu : luka-luka babras di bahu, punggung dan dada; luka lebam pada kelopak mata atas; dan bengkak di daerah kepala.

Setelah Penyidik Anak menyerahkan tanggung jawab Anak pelaku tindak pidana dan barang bukti kepada Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum Anak melimpahkan perkara Anak tersebut ke Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Primair pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Dakwaan Kesatu Subsidair pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ATAU

Dakwaan Kedua pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila diteliti secara seksama penanganan perkara Anak tersebut, maka dalam proses peradilan pidana anak pada tingkat penuntutan, terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Permasalahan dalam hal Penuntut Umum Anak melakukan penahanan terhadap Anak pelaku tindak pidana padahal perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut ancaman pidana penjaramaksimal hanya 5 tahun,sehingga tindakan penahanan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Permasalahan dalam hal Penuntut Umum Anak tetap melakukan penahanan terhadap Anak pelaku tindak pidana meskipun telah ada jaminan dari para orang tua Anak, sehingga tindakan penahanan tersebut juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Permasalahan dalam hal Penuntut Umum Anak tidak mengindahkan status Anak pelaku tindak pidana yang masih pelajar sehingga Anak pelaku tindak pidana tersebut tidak bisa mengikuti pendidikan formal karena ditahan oleh Penuntut Umum, sehingga tindakan penahanan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

4. Permasalahan dalam hal Penuntut Umum tidak objektif dalam menggunakan dasar hukum sebagai syarat untuk melakukan tindakan hukum yaitu pada tingkat penuntutan Penuntut Umum Anak melaksanakan Diversi dengan dasar pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan ternyata pada tingkat penuntutan tersebut Penuntut Umum Anak juga melakukan penahanan terhadap Anak padahal syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap anak adalah tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga syarat untuk tindakan Diversi dan Penahanan terhadap anak tersebut sangat bertolak belakang, seharusnya hanya satu tindakan hukum yang dapat dilakukan apakah Diversi tanpa melakukan penahanan atau Penahanan tanpa melakukan Diversi, karena apabila perkara Anak tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan Diversi pasti tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan sebaliknya apabila perkara Anak tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan maka pasti tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Diversi;
5. Permasalahan dalam hal Penuntut Umum Anak menerapkan aturan pidana umum yakni pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki ancaman hukuman lebih berat yakni sampai 9 tahun penjara yang diterapkan dalam dakwaan alternatif padahal sudah

diatur dalam aturan pidana yang khusus, sehingga tindakan Penuntut Umum Anak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

6. Permasalahan dalam hal Anak pelaku tindak pidana tersebut akhirnya oleh Penuntut Umum Anak dituntut pidana penjara berdasarkan pembuktian dakwaan kesatu primair pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga semakin memperjelas menunjukkan bahwa seharusnya dakwaan alternatif pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak perlu didakwakan oleh Penuntut Umum Anak, karena sebenarnya sebelum perkara anak tersebut dilimpahkan ke pengadilan Penuntut Umum Anak sudah menyakini betul bahwa yang akan dibuktikan hanya dakwaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan pidana khusus dan sangat tidak mungkin Anak pelaku tindak pidana tersebut akan dituntut berdasarkan dakwaan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum Anak tidak bertindak objektif, serta mengabaikan asas keadilan dan penghindaran pembalasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.



## **B. Rumusan Permasalahan**

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam proses peradilan Anak pada tingkat penuntutan, apakah ada hak-hak Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tidak dipenuhi oleh Penuntut Umum Anak?
2. Apakah alasan Penuntut Umum Anak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan hak-hak Anak pelaku tindak pidana tersebut pada tingkat penuntutan?
3. Apakah pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum Anak telah menerapkan dakwaan terhadap Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bahwa tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan hukum ini antara lain, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak-hak Anak yang telah terpenuhi pada proses peradilan pidana Anak pada tingkat penuntutan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

2. Untuk mengetahui alasan Penuntut Umum Anak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan hak-hak Anak pelaku tindak pidana pada tingkat penuntutan;
3. Untuk mengetahui alasan Penuntut Umum Anak menerapkan dakwaan alternatif yang diatur dalam aturan pidana umum dalam penanganan perkara tindak pidana khusus perlindungan anak.

#### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Berikut adalah manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis serta kegunaan penelitian dari hasil penulisan hukum ini, sebagai berikut :

##### **Manfaat :**

1. Manfaat teoritis: Manfaat dari penulisan hukum ini adalah agar para insan hukum mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Anak yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sehingga Anak pelaku tindak pidana mendapatkan hak-haknya secara utuh.
2. Manfaat praktis:
  - a. Bagi penulis : manfaat penulisan hukum ini bagi penulis adalah agar lebih mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana khususnya tingkat penuntutan serta untuk mengetahui undang-undang apa yang dapat diterapkan terhadap Anak pelaku tindak pidana.

- b. Bagi ilmu pengetahuan : sebagai sumbangsih terhadap rumpun ilmu hukum khususnya dalam hal pidana anak yang memang menjadi sorotan penulis pada penulisan hukum ini.

**Kegunaan :**

1. Bagi Penuntut Umum Anak, agar lebih memiliki perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak serta melaksanakan bagaimana seharusnya melindungi hak-hak Anak pelaku tindak pidana sehingga Anak pelaku tindak pidana dapat memperoleh hak-haknya secara utuh.
2. Bagi masyarakat, dengan dibuatnya penulisan hukum ini akan berguna untuk mengetahui apasajakah hak yang dimiliki oleh Anak pelaku tindak pidana dan undang-undang apa yang dapat diterapkan bagi Anak pelaku tindak pidana.
3. Bagi akademisi hukum, dapat menjadi referensi tambahan terkait pidana khusus anak terutama praktik-praktik pemenuhan hak Anak yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal tersebut.
4. Bagi penulis, kegunaan penulisan hukum ini bagi penulis adalah agar mendapatkan jawaban-jawaban atas suatu permasalahan yang ditemukan pada tingkat penuntutan, dalam penanganan perkara khusus anak yang telah berkekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Negeri Kopenjeng Nomor :3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpn.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian :

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Menurut Amiruddin dalam bukunya menjelaskan bahwa jenis penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).<sup>4</sup>

Dalam penulisan ini, penulis ingin menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses peradilan pidana khususnya pada tingkat penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus anak yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpn.

### 2. Lokasi Penelitian :

“Menurut Nasution, lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi.”<sup>5</sup> Lokasi penelitian yang akan dituju oleh penulis adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang selaku lembaga yang menangani perkara tersebut khususnya pada tingkat penuntutan, perkara khusus

<sup>4</sup> Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 9.

<sup>5</sup> Nasution. 2003. *Metode Research*. Penerbit PT Bumi Aksara. Hal. 43.

anak yang telah berkekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor :3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpn.

### 3. Sumber Data :

#### a. Sumber Data Primer :

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>6</sup>

Sumber data primer dalam penulisan ini adalah seluruh data yang didapatkan dari wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang menangani perkara anak pada tingkat penuntutan.

#### a. Sumber Data Sekunder :

Terdapat beberapa pengertian mengenai data sekunder antara lain seperti yang telah dipaparkan oleh Umi Narimawati yakni data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data. "Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen"<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung. Penerbit Agung Media. Hal. 98.

<sup>7</sup> Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta. Hal. 137.

Sumber data sekunder bagi penulis antara lain berkas-berkas perkara khususnya berkas perkara tingkat penuntutan, yang berkaitan dalam penanganan perkara khusus anak yang telah berkekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpn. Selain itu sumber data sekunder dalam penulisan ini juga berasal dari undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat serta bahan-bahan lain yang berasal dari web, atau karya tulis lain yang dapat menunjang atau dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data :**

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis antara lain :

##### **a. Wawancara**

Menurut Joko Subagyo yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan dan menanyakan langsung dengan responden.<sup>8</sup>

Dalam hal wawancara penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut yaitu dengan Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang menangani perkara anak pada tingkat penuntutan yaitu Ibu Juni Ratnasari, S.H. Dalam wawancara

---

<sup>8</sup> P Joko Subagyo.2011. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 39.

dengan narasumber, penulis akan mencoba menggali seluruh data yang dibutuhkan untuk menjawab seluruh permasalahan yang diangkat oleh penulis.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini dilakukan dengan menelaah berkas perkara khususnya berkas perkara pada tingkat penuntutan, dalam penanganan perkara khusus Anak yang telah dilimpahkan, diperiksa serta diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpn guna menemukan data-data yang diperlukan oleh penulis.

## 5. Analisa Data

Penganalisaan data yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode analisis kualitatif dimana penulis akan menganalisa data-data yang telah didapatkan baik data yang berasal dari dokumentasi maupun yang berasal dari wawancara yang kemudian akan diolah menjadi suatu data utama.

Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bogdan dalam Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 248.

## **F. Rencana Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

### **3. BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam pembahasan akan dikaitkan dengan kajian teori serta landasan yuridis yang tepat.

### **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian hukum serta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis.